

Bro Ron diusulkan jadi Cawabup Berpasangan dengan Jaro Ade

CIBINONG (IM) - Ronald Aristone Sinaga atau Bro Ron diusulkan menjadi Cawabup Bogor berpasangan dengan Jaro Ade di ajang Pilbup Bogor 2024.

Bro Ron yang merupakan Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan juga selebgram itu dinilai cocok menjadi Cawabup Bogor mendampingi Jaro Ade.

Sebagai Cawabup Bogor, Bro Ron diprediksi bakal menambah raih suara di Pilbup Bogor, terutama dari kaum milenial dan Gen Z yang jumlahnya diperkirakan mencapai 50 persen dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mencapai lebih dari 3,8 juta jiwa.

"Saya mengusulkan Bro Ron berpasangan dengan Jaro Ade di Pilbup Bogor 2024, ia mewakili harapan anak muda Bogor yang gandrung di sosial media terutama instagram," kata Ketua Gibranku Bogor Raya, Dita Fajar Bayhaqi kepada wartawan, Rabu (27/3).

Ia optimis Bro Ron bisa berperan penting dalam kemenangan Jaro Ade di Pilbup Bogor 2024.

Apalagi, tuturnya Bro

Ron yang tidak turun ke masyarakat untuk kampanye memiliki bekal 25 ribu suara di Pemilihan Legislatif (Pileg) lalu.

"Bro Ron, tidak turun kampanye saja raih suaranya di Pileg 2024 mencapai 25 ribu suara, mayoritas raih suara itu mayoritas di Bogor Timur, hingga dengan kehadiran Bro Ron, Jaro Ade bakal mendapatkan suara dari kaum milenial, Gen Z dan juga masyarakat di Bogor Timur, Parungpanjang dan sekitarnya," tuturnya.

Ia melanjutkan, dengan kehadiran Bro Ron itu Jaro Ade nantinya bisa membenahi permasalahan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan lainnya.

"Permasalahan infrastruktur menjadi pekerjaan rumah dan beban Pemkab Bogor selama beberapa tahun terakhir, dimana kasusnya sudah dan sedang ditangani KPK, lalu banyak juga proyeknya yang terbengkalai hingga kehadiran Bro Ron yang ahli infrastruktur bisa menjadi solusi atas permasalahan tersebut," lanjut Fajar sapaan akrabnya. ● **gio**

Longsor Susulan Ancam Tim, Pencarian Korban Dihentikan Sementara

NGAMPRAH (IM) - Tim SAR Gabungan terpaksa menghentikan sementara proses pencarian sisa korban tertimbun bencana tanah longsor di Kampung Gintung RT03/07, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Penghentian sementara pencarian korban tertimbun longsor itu dilakukan menyusul adanya longsor susulan yang dipicu hujan yang mengguyur lokasi bencana sejak sore hari kemarin hingga malam tadi.

"Tadi pagi kita sempat laksanakan pencarian di hari ketiga, tapi kemudian dihentikan sementara sesuai hasil assessment. Kita hentikan sampai jam 12.00 WIB," kata Kepala Seksi Operasi dan Siaga pada Kantor SAR Bandung, Supriono di lokasi kejadian, Rabu (27/3).

Menurutnya, penghentian sementara pencarian korban tertimbun longsor tersebut dilakukan karena bahaya mengintai sehabis hujan.

Selain itu, potensi bahaya meningkat setelah hujan deras mengguyur pada Selasa 26 Maret 2024 mulai pukul 17.00 WIB sampai 23.00

WIB. Kondisi tersebut memicu material longsor semakin labil dan membahayakan petugas.

"Kami hentikan sementara karena di hari kedua pukul 17.00 sampai 23.00, terjadi hujan ringan sampai deras. Akibatnya, berpotensi mengancam keselamatan petugas dengan longsor susulan," paparnya.

Pihaknya bakal kembali melakukan evaluasi kondisi di lapangan terkait kemungkinan dilanjutkannya proses pencarian atau pencarian dihentikan setelah pukul 12.00 WIB.

"Kita akan evaluasi lagi nanti kondisi di lapangan memungkinkan dilanjutkan pencarian lagi atau tidak. Karena kita juga harus terus melihat kondisi cuaca," bebernya.

Hasil pemetaan, sebut Supriono, titik longsor sebelumnya meluas. Kemudian muncul titik longsor baru yang bisa menimbulkan bahaya bagi petugas Tim SAR Gabungan.

"Ada titik longsor baru. Tim assessment sudah pemetaan, titik longsor itu tentunya dari atas seperti yang sebelumnya," sebutnya. ● **pra**

Ratusan Rumah Korban Longsor di Cipongkor akan Direlokasi

BANDUNG (IM) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan korban longsor di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat akan direlokasi. Karena, tempat tinggal korban longsor sudah tidak layak dihuni termasuk rumah-rumah yang berada di sekitar lokasi.

"Pascananti tanggap darurat sudah selesai ini ada beberapa ratus rumah yang harus direlokasi," ujar Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto saat meninjau lokasi longsor di Cibenda, Bandung Barat, Rabu (27/3).

Ia mengatakan, rumah korban longsor yang terdampak langsung sebanyak 30 rumah. Namun, relokasi juga akan dilakukan kepada rumah warga yang berada di sekitar area longsor. "Untuk relokasi tidak hanya 30 rumah yang tertimbun ya, tapi mungkin dikelilinginya juga yang dirasa kurang aman, ini akan kita relokasi ke tempat yang lebih aman," katanya.

Suharyanto menyebutkan saat ini tengah dilakukan proses penyiapan lahan, dan pendataan korban longsor. Ia berharap proses relokasi dapat segera mungkin dilakukan. "Dari dialog kepada masyarakat, masyarakat juga takut untuk kembali ke rumah masing-masing karena khawatir ada bencana longsor susulan," katanya.

Menurutnya, total warga

yang mengungsi di sekolah dasar dan GOR Cibenda kurang lebih 500 pengungsi. Pihaknya juga mengecek kondisi dapur umum, dan ketersediaan logistik. "Di tempat ini kurang lebih 500 pengungsi, tadi kami sudah melihat kondisinya, ini hari ketiga mereka mengungsi. Kita juga cek dapur umum, cek juga ketersediaan logistik," katanya.

Suharyanto menambahkan bantuan dana siap pakai akan diberikan secara bertahap kepada korban longsor di Cibenda, Cipongkor. Pihaknya memastikan bahwa kebutuhan pengungsi harus betul terpenuhi. "Tadi dana operasional bupati Rp 250 juta, Kodim, Korem masing-masing Rp 150 juta untuk pengendalian kemudian barang bantuan lengkap, ada sembako, makanan siap saji, matras selimut, genset, dan sebagainya," kata dia.

Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi empat korban, Selasa (26/3) kemarin yang mana terdiri dari label pertama jenis kelamin perempuan anak-anak ditemukan pukul 11.54 WIB, label kedua jenis kelamin laki-laki anak pukul 12.23 WIB dan label ketiga perempuan dewasa pukul 12.56 WIB.

Serta korban atau label keempat ditemukan pukul 16.32 WIB berjenis kelamin perempuan dewasa. Proses pencarian masih dilakukan untuk mencari enam korban lainnya. ● **pra**

8 | Nusantara

IDN/ANTARA



PENGAWASAN BAHAN PANGAN JELANG HARI RAYA

Petugas Dinas Kesehatan memeriksa bahan pangan di Pasar Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Rabu (27/3). Pemerintah setempat melakukan pengawasan bahan pangan dan kemudian dilakukan uji laboratorium sebanyak 43 sampel bahan pangan dengan hasil ditemukan kandungan formalin dan pewarna tekstil Rhodamin B pada sejumlah bahan pangan yang dapat membahayakan tubuh.

Pemkab Bogor Komitmen Tingkatkan Nilai MCP Tahun 2024 dari KPK

Pemerintah Kabupaten Bogor telah memasuki zona hijau atau di atas nilai 85 poin pada MCP tahun 2023. MCP merupakan Informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia meliputi delapan area intervensi.

CIBINONG (IM) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat berkomitmen untuk meningkatkan nilai monitoring center for prevention (MCP) tahun 2024 dari Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK). Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Suryanto Putra di Cibinong, Rabu (27/3), menjelaskan bahwa langkah awal yang dilakukan Pemer-

intah Kabupaten Bogor yaitu menggelar rapat koordinasi bersama seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Melalui rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor menentukan tiga agenda utama dalam upaya meningkatkan nilai MCP, mulai dari menetapkan kelompok kerja atau tim kawal, mengampu MCP tiap area intervensi dan program pendukung, serta menyusun rencana aksi dan pemenuhan MCP tahun 2024.

"Saya minta komitmen, keseriusan dan tanggung jawab semua stakeholder MCP KPK, untuk bekerja optimal dan berupaya semaksimal mungkin, agar hasil MCP

KPK Kabupaten Bogor bisa lebih baik dari tahun sebelumnya," kata Suryanto.

Ia menerangkan, untuk kelancaran pelaksanaan MCP KPK tahun 2024, pihaknya akan membuat surat edaran Sekretaris Daerah kepada seluruh perangkat daerah yang memuat petunjuk teknis pelaksanaan MCP KPK tahun 2024.

"Sesuai aturan dan timeline yang sudah ditetapkan, program MCP KPK sudah dimulai dari tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan 5 Januari 2025," ujarnya. Pemerintah Kabupaten Bogor telah memasuki zona hijau atau di atas nilai 85 poin pada MCP tahun 2023.

MCP merupakan Infor-

masi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia meliputi delapan area intervensi.

Penilaian MCP dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan aplikasi untuk memonitoring sejauh mana delapan area intervensi dilaksanakan di seluruh Pemda se-Indonesia, termasuk di Kabupaten Bogor.

Delapan area tersebut di antaranya, pelayanan perizinan, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pajak, pengelola pengadaan barang dan jasa dan lainnya. ● **gio**

Pj. Bupati Bogor Apresiasi Dompot Dhuafa



Pj Bupati Bogor mengapresiasi kegiatan Dompot Dhuafa yang memberi akses masyarakat dan pengungsi anak-anak pendidikan berkualitas.

CISARUA (IM) - Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu memberikan apresiasi kepada Dompot Dhuafa yang sudah mendirikan Learning and Empowerment Center (LEC) di Kecamatan Cisarua. Menurutnya, ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar dan para pengungsi anak-anak untuk mengakses pendidikan yang

berkualitas. Peresmian LEC Dompot Dhuafa dihadiri Kepala Lembaga Pelayan Masyarakat Dompot Dhuafa, Direktur Eksekutif GREAT Edunesia, Camat Cisarua, para kepala desa dan lurah, Forkopimcam Cisarua, perwakilan MUI Cisarua, dan jajaran Dompot Dhuafa.

Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu mengatakan,

atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, saya mengapresiasi Dompot Dhuafa sudah memilih lokasi di Kecamatan Cisarua untuk mendirikan Learning and Empowerment Center (LEC).

"Semoga fasilitas ini dapat berfungsi optimal, maju dan berkembang sebagai pusat pemberdayaan masyarakat sekaligus memperluas akses bagi masyarakat lokal maupun para pengungsi anak-anak akan pendidikan yang berkualitas," ujarnya.

Asmawa menuturkan, Kabupaten Bogor adalah salah satu kabupaten terluas dan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Bogor dan stakeholder terkait, untuk memberikan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas.

"Diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh

stakeholder baik pemerintah pusat dan daerah, swasta, non governmental organization, dan komunitas masyarakat sipil untuk menjawab berbagai permasalahan sosial dan tantangan dunia pendidikan," tutur Asmawa.

Asmawa Tosepu berharap, LEC Dompot Dhuafa ke depan maju dan berkembang, sehingga membuka akses pendidikan yang lebih luas untuk berbagai lapisan masyarakat, serta membentuk karakter bangsa.

Kepala Lembaga Pelayan Masyarakat Dompot Dhuafa, Kamaludin menjelaskan, pihaknya ingin menggabungkan inklusivitas sosial. Tempat ini adalah tempat belajar, tempat pemberdayaan, kita ingin wujudkan kebersamaan inklusivitas sosial antara anak-anak dari masyarakat sekitar dengan para pengungsi anak-anak yang berasal dari negar-negara konflik di dunia.

"Kita harus menyatukan

mereka, di tempat ini, insya Allah nanti kita akan sama-sama belajar. Harapannya mereka bisa saling berinteraksi, saling menghormati dan juga saling mempelajari budaya satu sama lain," jelas Kamaludin.

Ia menambahkan, tak hanya program pendidikan, ada juga program kesehatan, dakwah, advokasi, sosial, dan ekonomi. Untuk para pengungsi, mereka diberikan kursus Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Untuk masyarakat lokal, kita berikan juga kursus Bahasa Inggris.

"Ini adalah bentuk kegigihan Dompot Dhuafa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membuka akses pelayanan kesehatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk membangun dakwah di Kabupaten Bogor," kata Asmawa. ● **gio**

Pj. Bupati Bogor Terima Kunjungan Komisi VIII DPR dan Pemerintah Pusat

CIBINONG (IM) - Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI bersama jajaran pejabat Kementerian Sosial dan BNPB RI ke wilayah Kabupaten Bogor. Kunjungan ini guna memperkuat kolaborasi terutama dalam pengelolaan bantuan sosial dan penanganan bencana, yang berlangsung di Gedung Serbaguna I Setda, Cibinong pada Selasa (26/3).

Perlu diketahui selain kunjungan juga dilakukan pemberian bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (antensi) Kemensos berupa sembako, nutrisi, kebersihan diri dan kewirausahaan. Serta penyerahan bantuan sosial Kemensos berupa Program Keluarga Harapan 1.

Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menjelaskan bahwa, di Kabupaten Bogor terdapat beberapa jenis bantuan sosial di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sumber dana dari APBN yang mana pada tahun 2023 sampai pada tahap keempat telah diberikan

kepada 130.163 keluarga penerima manfaat. Kedua program bantuan iuran atau PBI JKN BPJS Kesehatan melalui dana APBN yang diberikan kepada 1.675.985 jiwa.

Lanjut Asmawa Tosepu, ketiga adalah program sembako yang dananya berasal dari APBN untuk periode Januari sampai dengan Maret 2024.

"Keempat adalah pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja atau PUPB yang didaftarkan ke BPJS Kesehatan dengan anggaran dari APBD Kabupaten Bogor yang diberikan kepada 523.081 jiwa untuk periode Februari 2024 dengan sumber data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor," terang Pj. Bupati Bogor.

Menurutnya, berkaitan dengan penanganan bencana Pemkab Bogor terus berupaya mewujudkan wilayah Kabupaten Bogor yang tangguh bencana melalui upaya mitigasi bencana yang telah dan terus dilakukan baik itu mitigasi struktural yaitu membangun tembok, penahan tebing, perbaikan dan penguatan bangunan termasuk dengan mitigasi non struktural. Yakni melalui pelatihan

berbasis masyarakat pembentukan relawan satgas Desa Tangguh Bencana serta pelatihan kepada warga masyarakat termasuk warga di dunia pendidikan.

"Juga dilakukan penanaman pohon, penyebarluasan informasi di daerah bencana dan analisis pemetaan geologi dan hidro-meteorologi sebagai wujud kesiapsiagaan bencana. Pemerintah Kabupaten Bogor juga melaksanakan penyusunan kajian risiko bencana penyusunan dokumen rencana penanganan bencana, penyusunan rencana kontijensi pelatihan dan bimtek. Termasuk pembentukan desa tangguh bencana penguatan kelembagaan bekerja sama dengan forum pengurangan risiko bencana dan sejumlah kolaborasi yang sifatnya pentahelix," ungkap Asmawa Tosepu.

Di tempat yang sama, Ketua Tim sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahid menyampaikan, pihaknya di sisi anggaran telah menyetujui usulan pemerintah berkaitan dengan anggaran



Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah Pusat mengunjungi Pemkab Bogor untuk mengetahui cara mengelola bantuan dan penanganan bencana.

untuk penanganan sosial di Kementerian Sosial sebesar Rp79 Triliun dan anggaran Bansos lebih dari Rp400 Triliun.

"Komisi VIII bersama pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial punya kewajiban untuk menanganai 10 juta keluarga PKH, sementara di bantuan pangan sembako kepada 18 juta keluarga untuk mendorong keluar dari kemiskinan menuju masyarakat sejahtera," bebernya.

Katanya, melalui kegiatan ini ia ingin memberikan perhatian kepada masyarakat Kabupaten Bogor terutama masyarakat yang berada di

daerah rawan bencana agar penanganan dan mitigasi bendanya lebih optimal melalui kolaborasi dan sinergi antara BNPB, Komisi VIII, Kemensos dan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Tutur hadir dalam acara ini yakni, Plt. Direktur PSKBA Kemensos RI, M. Delmi, Kepala Setra Galih Pakuan Bogor, Rinto Indratmoko, Plt. Direktur PPF BNPB, Syavera, jajaran anggota Komisi VIII DPR RI, Kepala BPBD Kabupaten Bogor dan Kepala Dinsos Kabupaten Bogor. ● **gio**